

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 dan 2019 .....	A-1
Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2019 .....	B-1
Lampiran 3: Data wisatawan Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019 .....	C-1
Lampiran 4: Daftar jumlah penginapan di Kabupaten Sleman .....	D-1
Lampiran 5: Daftar jumlah rumah makan yang memiliki ijin TDUP di Kabupaten Sleman .....	E-1
Lampiran 6: Daftar keberagaman potensi wisata di Kabupaten Sleman .....	F-1
Lampiran 7: Perbandingan PDRB masing-masing Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	G-1
Lampiran 8: Tipologi Klassen Tahun 2015-2020.....	H-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbagai organisasi meningkatkan kinerjanya baik kinerja keuangan maupun kinerja pelayanan untuk mencapai target yang menjadi tujuan agar tetap eksis dan berkembang. Disamping itu, era globalisasi dan transisi ke dunia digital menambah ketatnya persaingan dalam industri ekonomi. Kinerja laporan keuangan adalah gambaran pencapaian usaha yang telah dilakukan untuk mengarah pada tujuan. Kinerja keuangan ialah melakukan analisis untuk memahami sejauh mana perusahaan menggunakan aturan penegakan keuangan secara benar (Fahmi, 2012).

Selain ketatnya persaingan terdapat faktor lain penyebab industri harus meningkatkan kinerjanya. Kondisi sekarang dengan adanya pandemi diberbagai negara yang disebabkan oleh virus Covid-19, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor ekonomi bidang pariwisata terdampak secara signifikan. Sebagai salah satu dampaknya, kunjungan wisatawan tahun 2019 menunjukkan tren yang menurun pada angka wisatawan mancanegara (Sleman, 2019).

Sleman merupakan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kontribusi signifikan pada bidang usaha yang potensial, memiliki destinasi wisata beragam seperti wisata desa, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner yang didukung oleh banyaknya hotel dan restoran (Sleman, 2020). Perkiraan rata-rata nilai PDRB dari tahun 2019 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa sumbangan provinsi DIY terbesar terhadap nilai PDRB tidak mengalami perubahan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, nilai kontribusi

PDRB tertinggi adalah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta kedua, Kabupaten Bantul ketiga, Kabupaten Gunungkidul keempat, dan Kabupaten Kulon Progo terakhir (DIY, 2019). Ekspansi dan pendayagunaan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Sleman menggunakan pengaruhnya terhadap PDRB (Suyitno, 2012).

Dikarenakan memiliki peluang besar menarik wisatawan, Kabupaten Sleman melakukan langkah strategis adaptif. Beberapa pilihan wisata baru bermunculan menawarkan konsep kekinian yang memiliki skala menengah hingga besar baik ditengah pedesaan maupun tengah Kabupaten Sleman. Sebagai wilayah yang berpotensi unggul, Kabupaten Sleman secara serius dan sangat terstruktur mengalokasikan dana untuk bidang pariwisata melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sebagai lanjutan dari peran pemerintah, anggaran yang tercantum dalam laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat umum melalui media secara berkala untuk mendeskripsikan hasil kinerja yang diraih selama periode tertentu. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan media, masyarakat harus memperhatikan media informasi yang dipakai untuk menilai kinerja suatu organisasi.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian ialah menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang memuat perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah Kabupaten Sleman

patutnya memberi teladan akuntabilitas yang transparan, kredibel dalam pengelolaan APBD dan dapat menjaga stabilitas ekonomi. Akuntansi sektor publik berpeluang luas untuk berperan dalam upaya pemerintah mewujudkan akuntabilitas dan *good governance* dalam menginformasikan data yang relevan dalam manajemen, keuangan, dan pemeriksaan anggaran.

Kapasitas pemerintah tidak dapat diukur dari sudut hasil yang dirasakan saja. Namun, dengan cara terintegrasi harus memperhitungkan *input*, *output*, dan *outcome* secara serentak (Purwiyanti, 2017). Ketiga aspek tersebut dapat menentukan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis adalah memperoleh kualitas input tertentu dengan harga terendah. Efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Jika ilmu ekonomi berfokus pada masukan, efisiensi berfokus pada keluaran atau proses, dan efektivitas berfokus pada hasil. Mengukur tingkat efektivitas yakni dengan membandingkan pencapaian anggaran pendapatan dengan target anggaran (Mahmudi, 2016). Sedangkan efisiensi dapat diartikan sebagai rasio optimal antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dan sumber yang digunakan). Indikator yang relevan untuk mengukur ketiga persentase tersebut adalah *Value For Money*, guna mengukur kinerja organisasi sektor publik atas agenda yang terencana sebagai bahan evaluasi (Mahmudi, 2015). Seperti salah satu ayat dalam Al-qur'an Surat Ali-Imran ayat 180 tentang efisiensi, efektivitas, nilai, dan larangan menyembunyikan harta sebagai berikut:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنفَعَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١٨٠ - □

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” (Agama, n.d.)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Indikator *Value For Money* (Studi Kasus pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman).**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan pembahasan tidak melebar, maka terdapat batasan masalah dengan ruang lingkup Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019. Penelitian ini mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas anggaran menggunakan *Value For Money*.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang dirumuskan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019 dengan konsep *Value For Money*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2019 menggunakan *Value For Money*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi capaian. Jika dibagi menjadi beberapa sudut pandang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi capaian dan kontrol laporan keuangan guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi media referensi penilaian kinerja organisasi sektor publik dalam transparansi dan akuntabilitas ke umum. Sedangkan bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengontrol tingkat efektivitas pengalokasian anggaran yang berguna untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.